

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM (UED-SP)

Zaili Rusli, Febri Yuliani, Endang Sulistianingsih, Adianto, Abdul Sadad

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

e-mail: zailirusli@ymail.com

Abstract: Empowering the Poor Through Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). The purpose of this study to identify and analyze the empowerment of the poor through programs UED-SP in Kuala Terusan, District Kerinci, Pelalawan, Riau Province. The research method used is descriptive survey approach, at research that seeks to tell the existing problem-solving that comes with the existing literature. Data collection techniques performed in research this in three ways, namely interviews, written sources (documentation), fitted with a questionnaire. The results showed the performance management program UED-SP judged by the public, especially the beneficiaries of the program are considered good.

Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program UED-SP di Kuala Terusan, Kecamatan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan pendekatan survey yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada yang dilengkapi dengan literatur yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tiga cara, yaitu wawancara, sumber-sumber tertulis (dokumentasi), dilengkapi dengan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pengelola Program UED-SP dinilai oleh masyarakat terutama para penerima program dianggap sudah baik.

Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat miskin, Program UED-SP

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan memang telah lama ada. Pada masa lalu masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran modern masa kini masyarakat miskin dikategorikan kepada mereka yang tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern ini. Kemiskinan telah menjelma sebagai suatu penyakit sosial ekonomi bagi hampir seluruh masyarakat dunia. Namun di Indonesia ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi. *Pertama*, kemiskinan alamiah yang terjadi antara lain diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. *Kedua*, kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu me-

nguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lainnya yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin.

Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara ber-

martabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam usaha mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh (*comprehensive*), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan. Dimana konsep pertolongan merupakan upaya menolong yang lemah atau tidak berdaya (*powerless*) agar mampu berdaya baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Sebab pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berfikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimiliki.

Untuk itu salah satu langkah strategis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dengan membangun ekonomi lokal masyarakat, sehingga masyarakat nantinya dapat berdaya dengan kekuatan perekonomian yang ada di daerahnya. Sebab pembangunan ekonomi lokal mengarah kepada: *Pertama*, usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah. *Kedua*, proses dimana pemerintah lokal dan organisasi berbasis masyarakat terlibat dalam mendorong, merangsang atau memelihara aktivitas usaha dan atau penciptaan lapangan kerja. *Ketiga*, sebagai solusi dalam pemulihan dan pengembangan perekonomian nasional, terutama dalam pendayagunaan potensi ekonomi di masing-masing daerah dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakatnya masing-masing.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan harus diprioritaskan lebih optimal dalam penanganannya, yang lebih penting lagi sesuai de-

ngan UUD 1945 yang tertera di dalamnya dengan kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem perekonomian kita yang berbunyi: Perekonomian telah ditetapkan atas dasar-dasar itu supaya diupayakan untuk pengentasan kemiskinan yang harus dilakukan.

Menurut Surjono (2007) mengemukakan bahwa kemiskinan lebih ditekankan pada kondisi miskin sebagai individu yang membedakannya dari orang lain yang tidak miskin. Dengan kata lain, kemiskinan digunakan sebagai cara untuk mengklasifikasikan bahwa individu dikatakan miskin apabila dia tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Sudantoko (2009), kemiskinan terbagi atas tiga, yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang.

Upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama di daerah pedesaan harus dipahami sebagai upaya yang bertujuan untuk memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dan tidak dengan menekan mereka ke pinggir atau posisi ketergantungan.

Upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pengentasan di daerah pedesaan harus dipahami sebagai upaya yang bertujuan untuk memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan

tidak dengan menekan mereka keposisi ketergantungan.

Upaya pengentasan kemiskinan adalah proses pemberdayaan terhadap masyarakat miskin itu sendiri. Pemberdayaan selalu mengacu kepada kelompok masyarakat yang berada pada lapisan bawah. Siagian (2002) mengemukakan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan untuk menggali dan membangkitkan segenap potensi yang ada dalam diri manusia itu agar dapat memberi manfaat bagi diri dan lingkungannya. Sesungguhnya manusia punya potensi adakalanya potensi itu bangkit dengan sendirinya adakalanya potensi itu bangkit perlu digerakkan.

Sumaryadi (2005) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka di dengar untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan keahlian di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi.

Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat dengan pemberian dana usaha desa menuju kemandirian desa. Pelaksanaan Program UED-SP di Kecamatan Kerinci sudah berjalan di Desa Kuala Terusan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program UED-SP di Kuala Terusan, Kecamatan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada yang dilengkapi dengan literatur yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pe-

nelitian ini melalui tiga cara, yaitu wawancara, sumber-sumber tertulis (dokumentasi), dilengkapi dengan kuisioner. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner, sehingga informasi yang didapatkan dalam penelitian ini nantinya lebih akurat dan sempurna, selain itu juga digunakan untuk mendapatkan verifikasi data yang diperoleh melalui pengambilan data utama dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner adalah penyebaran angket/pertanyaan yang sifatnya tertutup dikombinasikan dengan terbuka. Untuk keperluan pengumpulan data selengkapnya ditetapkan sejumlah responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua konsep penting yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum merumuskan pengertian pemberdayaan. Kedua konsep dimaksud adalah konsep pemberdayaan dan memberdayakan. Keberdayaan dalam konteks diri dan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Kartasmita (1996) menegaskan jika dalam suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Di samping itu, adapula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti kekeluargaan, kegotong-royongan dan bagi Indonesia adalah kebhinekaan.

Keberdayaan merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Memberdayakan diri dan masyarakat adalah upaya untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan anggota masyarakat. Dalam pengertian ini, upaya memberdayakan diri dan masyarakat harus dilakukan.

Desa Kuala Terusan Kecamatan Kerinci adalah salah satu desa di Kabupaten Pelalawan yang telah melaksanakan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam. Secara umum Pada Tingkat

Kepatuhan (*compliance*) Birokrasi diketahui bahwa key informan mengetahui adanya informasi atau sosialisasi tentang program UED-SP yang dilakukan oleh pihak pengelola program atau aparatur desa.

Pengetahuan masyarakat desa tentang Program UED-SP ini dikarenakan adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat. Pengetahuan masyarakat tentang program UED-SP tersebut juga diikuti dengan pengetahuan mereka tentang proses penentuan kelompok sasaran yang akan dijadikan calon penerima program UED-SP di desa Kuala Terusan, sebagian besar informan mengetahui bahwa proses penentuan kelompok sasaran program adalah masyarakat desa kuala terusan yang mengajukan proposal kegiatan, artinya masyarakat mengetahui bahwa untuk penentuan kelompok sasaran mereka haruslah memiliki usaha yang mempunyai potensi yang bagus untuk di kembangkan. Usaha tersebut haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pengelola program atau aparatur desa.

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola program UED-SP sebagai calon penerima program atau kelompok sasaran akan disosialisasikan pada saat program akan dilaksanakan dan seleksi penentuan kelompok sasaran yang akan dijadikan calon penerima program. Secara umum persyaratan tersebut adalah bahwa calon penerima program harus memiliki program atau usaha yang jelas untuk dilaksanakan. Peminjaman modal pada UED-SP juga menggunakan angguna yang sesuai dengan besaran modal yang akan dipinjam. Selanjutnya syarat administratif yang harus mereka lengkapi antara lain kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bukan pengetahuan tentang persyaratannya yang mereka persoalkan tetapi persyaratan yang menggunakan anggunalah yang mereka beratkan, karena kondisi kemiskinan yang membelenggu mereka, sehingga mereka tidak memiliki akses kepemilikan modal. Karenanya pada akhirnya membuat program ini berjalan tidak maksimal. Rata-rata masyarakat yang memulai usahanya

harus berfikir angguna apa yang mereka harus jaminakan, sementara kepemilikan mereka terhadap hal tersebut sangat terbatas. Itulah yang terkadang menjadi persoalan bagi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak berpartisipasi penuh pada program ini. Pada pelaksanaan Program UED-SP seluruh peserta program mengetahui bagaimana kualitas ketersediaan Sumber Daya (SDM dan fasilitas kerja) pengelola UED-SP melalui pengamatan dan interaksi yang mereka lakukan juga terlihat dari laporan bulanan yang mereka dapatkan disetiap bulannya.

Penilaian terhadap kinerja pengelola Program UED-SP dinilai oleh masyarakat terutama para penerima program dianggap sudah baik. Ini terbukti dari seringnya sosialisasi tentang program yang dilakukan, selain para anggota program juga saling kenal secara pribadi dengan pengelola program yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Kuala Terusan. Kondisi ini satu sisi sangat menguntungkan karena memudahkan sosialisasi karena komunikasi yang telah terbangun dengan baik, namun di sisi lain terkadang menimbulkan masalah karena penilaian calon penerima menjadi dipengaruhi oleh faktor kedekatan antara pengelola dan penerima program, meskipun kasus ini sangat jarang terjadi.

Karena komunikasi yang terjalin cukup baik maka antara pelaksana Program UED-SP desa Kuala Terusan yang terdiri dari pihak pengelola, pihak aparatur desa dan pihak para penerima program terjadi koordinasi yang baik. Untuk evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan, para penerima program juga mengetahui bahwa pelaksanaan UED-SP di Desa Kuala Terusan diawasi oleh pihak lembaga pengawas yang sudah ditunjuk oleh pihak desa atau kecamatan. Hal ini diketahui oleh masyarakat dari adanya pihak-pihak yang datang dan bertemu serta memalukan penilaian terhadap para pengelola kegiatan juga dapat diketahui langsung dari pihak pengelola yang menjelaskan kepada penerima program bahwa mereka dalam berkerja sebagai pengelola juga mendapat penilaian dan diawasi oleh pemerintahan setempat baik dari pihak desa maupun kecamatan. Hal inilah yang selalu diingatkan oleh pengelola agar kegiatan tersebut

dapat berlangsung tanpa ada masalah baik internal maupun eksternal.

Proses evaluasi ini juga berlanjut pada sanksi yang diberikan kepada penerima program UED-SP, apabila tidak mampu untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar konsistensi kegiatan tetap berlangsung dan masyarakat sebagai penerima program tetap termotivasi untuk menjadikan usahanya lebih produktif lagi. Para penerima program mengetahui dengan jelas bahwa apabila mereka tidak mampu mengembalikan modal yang mereka pinjam, maka anggunan yang mereka jaminkan akan diambil atau disita oleh pelaksana atau pengelola program.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan tersebut. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peran masyarakat di dalamnya.

Demikian pula dengan program UED-SP di Desa Kuala Terusan, pranata seperti ketersediaan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dari program tersebut. Dalam hal penyusunan proposal permohonan untuk memperoleh dana pinjaman UED-SP di Desa Kuala Terusan ternyata belum terlaksana dengan baik. Kegagalan masyarakat secara luas dalam program ini salah satunya disebabkan karena aspek teknis yang belum terlaksana. Aspek teknis tersebut meliputi bimbingan teknis membuat proposal untuk mengajukan pinjaman modal, sebagaimana diketahui keterbatasan masyarakat karena rendahnya pendidikan membuat mereka tidak mampu memaparkan program secara konseptual yang memadai. Sebagaimana besar informan tidak mengetahui informasi tentang penyusunan proposal permohonan untuk memperoleh dana pinjaman UED-SP. Sehingga pada akhirnya mereka tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkannya usaha atau mendapatkan pinjaman modal baru untuk usaha mereka.

Ketidakhadiran mereka tentang prosedur pembuatan proposal usulan pinjaman juga diimbangi dengan pengetahuan mereka tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat apa saja yang ditetapkan oleh pengelola program UED-SP agar masyarakat bisa mengikuti program tersebut. Banyak dari calon peserta program hanya mengetahui bahwa untuk dapat pinjaman modal dari program tersebut hanyalah memiliki usaha dan anggunan, namun sebenarnya lebih dari itu, seorang calon peminjam modal pada program ini haruslah bertanggung jawab dan mempunyai keinginan yang besar untuk berkembang dan bukan menjadikan pinjaman ini satu-satunya cara untuk berusaha, namun semangat untuk lepas dari belenggu kemiskinan adalah hal yang lebih penting.

Dalam hal dukungan kelembagaan lokal, informan menilai bahwa pengelola program UED-SP dalam menyelesaikan permasalahan penerima program dan tingkat pemahaman pengelola program ataupun penerima program dalam pelaksanaan program dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi antara pengelola, pemerintah setempat dan masyarakat penerima program. Kendala yang dihadapi antara lain adalah pemahaman yang tidak optimal dari pengelola dan daya kreativitas dalam menerima informasi oleh penerima program. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kelemahan pengelola adalah pemahaman filosofis dari program pemberdayaan ini dan aspek-aspek teknis lainnya. Sedangkan dari pihak penerima program, ketidakhadiran dan karena tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan keinginan dan pemahaman aspek teknis masih sangat kurang. Ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat calon penerima program belum mengetahui dengan jelas bagaimana membuat proposal peminjaman modal yang benar, agunan seperti apa yang bisa mereka berikan serta bagaimana manajemen pengelolaan modal yang efisien sehingga modal yang diberikan dapat berkembang secara maksimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program UED-SP di Desa Kuala Terusan meliputi rasa ketakutan untuk tidak bisa mengem-

balikan modal. Ketakutan akan anggun yang akan hilang, ketakutan usaha yang dilakukan tidak berhasil. Faktor lainnya adalah ketidaknyamanan dan tidak ada perubahan dalam pelaksanaan kebijakan.

SIMPULAN

Penilaian terhadap kinerja pengelola Program UED-SP di Desa Kuala Terusan dinilai oleh masyarakat terutama para penerima program dianggap sudah baik. Kendala yang dihadapi antara lain adalah pemahaman yang tidak optimal dari pengelola dan daya kreativitas dalam menerima informasi oleh penerima program. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kelemahan pengelola adalah pemahaman filosofis dari program pemberdayaan ini dan aspek-aspek teknis lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT elex media komputindo, 2009.
- Parson, Wayne. *Public policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Kencana Preneda Group, 2005.
- Prabu, Anwar Mangkunegara. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Retika Aditama, 2005.
- Siagian, Sondang. P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2002.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sudantoko, Djoko dan Hamdani, Muliawan. *Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. PP. Mardi Mulya, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian adiministrasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kalititatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharto Edi. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- Sumaryadi, Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama, 1999.
- Supriatna, Tjahya. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Rinks Cipta, 2000.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Surono, Agus. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: UM Press, 2007.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung dan CO, 2003.
- Tjiptoherijanto, Prinojo. *Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999.